

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menurunkan angka perceraian. Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap berbagai dokumen dan wawancara yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder. Melalui berbagai dokumen dan hasil wawancara, Pemerintah Kota Depok dinilai telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui program-program ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Program-program tersebut diantaranya terdapat Sekolah Pra Nikah, Sekolah Ayah Bunda, Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Komitmen pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Keluarga juga terlihat melalui Indeks Ketahanan Keluarga yang cukup tinggi pada tahun 2024, yaitu 90,27. Indeks Kepuasan Masyarakat yang menilai salah satu program ketahanan keluarga, yaitu PUSPAGA mendapatkan nilai 91,50 dan berada dalam kategori nilai mutu A.

Namun, melalui Kebijakan Ketahanan Keluarga yang telah dilaksanakan belum mampu menurunkan angka perceraian secara signifikan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan indikator *content of policy* dan *context of implementation* dari teori Grindle (2017), penulis dapat menarik kesimpulan bahwa angka perceraian di Kota Depok belum menurun secara signifikan karena terdapat beberapa aspek yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Argumen ini didasari pada hasil analisis bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian yaitu: 1) kolaborasi lintas sektor belum terlaksana, 2) terbatasnya sumber daya, dan 3) responsivitas lembaga masih rendah.

Berkaitan dengan kolaborasi lintas sektor, penulis menemukan fakta bahwa Pemerintah Kota Depok belum melaksanakan kolaborasi lintas sektor secara

optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum terbentuknya Lembaga Ketahanan Keluarga yang seharusnya diisi oleh berbagai sektor non pemerintahan. Pembentukan Lembaga Ketahanan Keluarga juga tertera dalam Perwali Kota Depok No.30 Tahun 2021 pada pasal 6 bahwa adanya susunan tim Pembina yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu: pemerintah daerah kota, lembaga Pendidikan, dunia usaha, organisasi/lembaga keagamaan, lembaga profesi, dan unsur yang berkaitan dengan keluarga dan anak. Dalam hal ini, pemerintah belum secara optimal melaksanakan kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Indikator kekuasaan, kepentingan serta strategi antar aktor juga melihat bahwa DP3AP2KB Kota Depok sebagai pihak yang memiliki kekuasaan besar tidak menggunakan kekuasaan tersebut untuk menekan kolaborasi antar sektor. Dengan ketidakhadiran sektor non pemerintah juga menyebabkan tidak tersalurnya kepentingan sektor-sektor lain.

Kemudian, berbicara terkait terbatasnya sumber daya anggaran, ditunjukkan melalui wawancara bahwa adanya pengurangan kuota peserta program. Terbatasnya sumber daya anggaran juga disebabkan adanya efisiensi yang berdampak pada implementasi program ketahanan keluarga. Tidak hanya itu, pergantian kepemimpinan Wali Kota Depok juga berdampak pada efisiensi anggaran terhadap program yang tidak menjadi prioritas. Efisiensi anggaran menunjukkan bahwa komitmen politik rezim terhadap suatu program tidak cukup kuat. Keterbatasan sumber daya ini dapat berpengaruh signifikan, terutama dalam konteks kebijakan publik yang bertujuan menciptakan perubahan sosial yang luas. Ketika jumlah peserta atau penerima manfaat dibatasi, maka jangkauan program menjadi sempit, sehingga dampak kebijakan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini juga akan memengaruhi efektivitas program, evaluasi kebijakan menjadi bias, dan legitimasi publik menurun. Ketika sumber daya terbatas, pelaksana di lapangan sulit menjalankan kegiatan sesuai rencana, sehingga output program tidak tercapai secara optimal. Dengan demikian,

minimnya anggaran dapat mengganggu keberlanjutan karena dampak positif yang dihasilkan tidak cukup besar untuk menciptakan perubahan sosial.

Lalu, responsivitas DP3AP2KB Kota Depok masih rendah ditunjukkan melalui mekanisme penerimaan aspirasi hanya dilaksanakan secara satu arah melalui survey. Hingga saat ini belum ada pelaksanaan forum konsultasi publik yang bersifat dua arah. Forum konsultasi publik menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan ketahanan keluarga di Kota Depok agar bersifat partisipatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rendahnya responsivitas DP3AP2KB Kota Depok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat juga terlihat melalui minimnya partisipasi masyarakat yang menggunakan layanan konseling. Responsivitas lembaga yang rendah dapat menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat karena lembaga gagal membangun kepercayaan publik, tidak mampu menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, kurang menyediakan informasi dan ruang partisipasi, serta tidak merespons keluhan warga secara memadai. Dengan demikian, rendahnya responsivitas berimplikasi langsung pada rendahnya motivasi dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah.

## **5.2 Saran**

### **5.2.Saran Teoritis**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, hasil penelitian dan analisis. Maka pada penelitian ini menegaskan pentingnya melihat para pemangku kepentingan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik melalui teori implementasi kebijakan publik dari Grindle (2017) dan konsep ketahanan keluarga. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh dinamika kepentingan setiap aktor yang terlibat, kapasitas institusi, komitmen politik serta responsivitas lembaga dalam memenuhi kebutuhan publik. Dalam

penelitian ini belum sepenuhnya melihat tingkat partisipasi masyarakat secara komprehensif. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meninjau lebih dalam aspek keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan Ketahanan Keluarga.

Pada penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan mengkaji peran masyarakat sebagai aktor non-pemerintah dalam implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga. Pendekatan ini akan membuka ruang untuk memahami bagaimana persepsi, kebutuhan, kapasitas, serta motif masyarakat memengaruhi efektivitas implementasi program. Meskipun teori Grindle menekankan peran aktor pelaksana dan struktur kelembagaan, integrasi dengan konsep partisipasi masyarakat akan memperkaya analisis, terutama karena ketahanan keluarga merupakan isu yang sangat bergantung pada inisiatif dan keterlibatan masyarakat.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga di Kota Depok, maka saran praktis berikut disusun untuk memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Depok, khususnya DP3AP2KB beserta jejaring lembaga terkait. Fokus saran diarahkan pada tiga persoalan utama implementasi, yaitu: (1) belum optimalnya kolaborasi lintas sektor, (2) terbatasnya sumber daya, dan (3) responsivitas lembaga masih rendah.

Pertama, yakni membentuk dan menguatkan kolaborasi lintas sektor. Implementasi kebijakan ketahanan keluarga di Kota Depok masih menunjukkan dominasi pemerintah sebagai aktor pusat, sementara pelibatan aktor lintas sektor belum berjalan secara terstruktur. Oleh karena itu, rekomendasi berikut diajukan yaitu pembentukan Lembaga Ketahanan Keluarga yang terdiri dari berbagai stakeholder, seperti OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial), Kantor Urusan Agama (KUA), instansi swasta, lembaga profesi, komunitas masyarakat yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Melalui

terbentuknya lembaga ini para stakeholder dapat turut serta dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program. Keterlibatan berbagai stakeholder juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengintegrasikan program lintas lembaga.

Kedua, yakni mengoptimalkan sumber daya. Pemerintah Kota Depok dapat mengambil langkah kemitraan dengan lembaga pendidikan, profesi, maupun instansi swasta. Kemitraan dapat melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang digunakan untuk mendukung program-program ketahanan keluarga. Lalu, integrasi program ketahanan keluarga dengan OPD lain juga dapat menjadi langkah yang efisien dalam meminimalisir anggaran.

Ketiga, terkait rendahnya responsivitas, DP3AP2KB Kota Depok dapat membentuk forum konsultasi publik yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dengan adanya forum juga dinilai dapat memperkuat legitimasi kebijakan. Mekanisme forum juga perlu dibentuk secara efektif agar setiap aspirasi yang diterima dapat diproses sesuai prosedur yang ada. Minimnya responsivitas seringkali dipicu oleh minimnya sosialisasi. Pemerintah Kota Depok dapat meningkatkan dan mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan terintegrasi. Strategi ini mencakup segmentasi target sasaran serta pemilihan media komunikasi yang efektif. Pemilihan media komunikasi juga termasuk dengan mengembangkan konten yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sosialisasi juga dapat diberikan pada saat kegiatan publik, seperti Car Free Day, bazaar, atau pelayanan keliling sebagai sarana sosialisasi yang mudah diakses masyarakat.